

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)BPR AKASIA MAS
TAHUN 2022



Ruko Mall WTC Serpong No.5829 & 5831 Jl. Raya Serpong, Pd.
Jagung, Serpong Utara 15326
TELEPON: 021-53163360

BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat dinamis pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan exposure risiko Bank. Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. BPR Akasia Mas memiliki komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Agus, SE,MM
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan/pengelolaan BPR.		
	b. Telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Sahammelalui RUPS.		
2.	c. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direktur Utama memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksinamun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.		
	d. Telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal seperti OJK danakuntan publik (KAP) yang ditunjuk atas persetujuan Dewan Komisaris.		
	e. Direktur Utama mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawabsebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelolayang baik (GCG)		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan/ pengelolaan BPRkhususnya bidang marketing dan bisnis/usaha BPR.		
	b. Telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal seperti OJK danakuntan publik (KAP) yang ditunjuk atas persetujuan Dewan Komisaris terkait temuan bidang kredit dan marketing.		
	c. Telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Sahammelalui RUPS.		
	d. Membantu dan mendukung tugas- tugas Direktur Utama BPR dalam mengelola operasional BPR sehari-hari.		
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
	a. Menindaklanjuti setiap hasil keputusan RUPS Tahunan yang telah ditetapkan terkaitdengan pengelolaan dan operasional BPR		
	b. Penerapan Tata Kelola telah dilakukan secara berkelanjutan dan menerapkan prudential banking dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis		

- c. Menindaklanjuti setiap hasil temuan pemeriksaan oleh OJK yang direkomendasikan kepada Dewan Komisaris BPR berdasarkan hasil exit meeting dengan Dewan Komisaris.
- d. Telah melaporkan kepada Dewan Komisaris setiap kejadian yang berdampak signifikan bagi BPR khususnya selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2022
- e. Tingkat kesehatan bank telah dipertahankan dalam posisi sehat
- f. Monitoring secara ketat dan selektif dalam pemberian kredit terhadap debitur yang terdampak Covid 19

Penjelasan Lebih Lanjut :

nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Johnny Laurenz Tamarindang
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS. b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan/pengelolaan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi. c. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG) serta sistem pengendalian internal yang efektif dalam setiap kegiatan usaha dan operasional BPR. d. Berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, pemeriksaan OJK, Audit Eksternal/KAP, dan pengawas otoritas lainnya. e. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Dewan Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operasional dan kredit, serta hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku		
2.	Nama	:	Wong Budi Setiawan
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS. b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan/pengelolaan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi. c. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha dan operasional BPR. d. Berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, pemeriksaan OJK, Audit Eksternal/KAP, dan pengawas otoritas lainnya. e. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Dewan Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operasional dan kredit, serta hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.		

Rekomendasi Kepada Direksi :
a. Menindaklanjuti setiap hasil keputusan RUPS Tahunan yang telah ditetapkan terkait dengan pengelolaan dan operasional BPR. b. Melaksanakan penerapan tata kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Resiko yang efektif dalam kegiatan operasional dan bisnis b. Menyusun dan mengusulkan struktur organisasi BPR dengan penunjukan dan penetapan Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR. c. Menindaklanjuti setiap hasil temuan pemeriksaan oleh OJK yang direkomendasikan kepada Dewan Komisaris BPR berdasarkan hasil exit meeting dengan Dewan Komisaris. d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris setiap kejadian yang berdampak signifikan bagi BPR khususnya selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2021.
Penjelasan Lebih Lanjut :
tidak ada

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Mengingat modal inti BPR belum mencapai Rp80 miliar, maka Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan untuk belum perlu membentuk komite-komite, seperti: Komite Manajemen Risiko, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
tidak ada			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus, SE,MM		Rp0,00	0%
2.	Anwar Musadad, SH		Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Direksi pada BPR Akasia Mas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR Akasia Mas				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus, SE,MM		-	-	0%
2.	Anwar Musadad, SH		-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham BPR lain dan pada perusahaan lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agus, SE,MM		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Anwar Musadad, SH		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan keuangan anggota direksi pada BPR tidak ada					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agus, SE,MM		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Anwar Musadad, SH		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga pada PT BPR Akasia Mas					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Johnny Laurenz Tamarindang		Rp0,00	0%
2.	Wong Budi Setiawan		Rp6.800.000.000,00	85%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR				
1. Johnny Laurenz Tamarindang tidak memiliki saham pada BPR				
1. Wong Budi Setiawan kepemilikan saham 85 %				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wong Budi Setiawan		602591	PT BPR Karya Bakti Sejahtera	20%
2.	Wong Budi Setiawan		-	PT Fintech Bina Bangsa	24%
3.	Wong Budi Setiawan		-	PT Akasia Mas Investama	9.8%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain sudah diketahui dalam RUPS					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Johnny Laurenz Tamarindang		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Wong Budi Setiawan		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan BPR					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Johnny Laurenz Tamarindang		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Wong Budi Setiawan		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan BPR					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	2	Rp1.363.200.000,00	2	Rp360.200.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp248.900.000,00	2	Rp33.900.000,00
3.	Tantiem	2	Rp137.600.000,00	2	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.749.700.000,00		Rp394.100.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tunjangan tunai (2)	mobil operasional (2)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (1), Asuransi Rawat Inap Manulife (1)	Asuransi Rawat Inap Manulife (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan pulsa (1)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
untuk tunjangan transportasi dan telepon bagi Direksi dibayarkan setiap bulan			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.69 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.09 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.14 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.96 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.89 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji (pokok) tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan (dalam 1 tahun)	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 April 2022	1	Tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK
2.	01 Agustus 2022	2	. Rasio Keuangan BPR Akasia Mas pada Tengah Semester 2022, NPL, Closing EOD, EOM, proses BPD, APU PPT
3.	31 Oktober 2022	2	Monitoring Kredit, BIK, Pembentukan Internal Control Cabang
4.	20 Desember 2022	2	Pembahasan RBB tahun 2023 dan Closing 2022
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pada tahun 2022 Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4(empat) kali, pada bulan April rapat dipimpin oleh Komisaris yakni Pak Wong Budi, dikarenakan Komisaris Utama Pak Johnny sedang fit an propher test serta pengajuan ke OJK dan secara resmi menjabat sebagai Komisaris Utama BPR per 01 Agustus 2022			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Johnny Laurenz Tamarindang		3	0	75%
2.	Wong Budi Setiawan		4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Untuk pelaksanaan rapat komisaris selama tahun 2022 selalu dihadiri oleh anggotakomisaris , dan berlangsung pada Kantor Pusat BPR Akasia Mas					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Pada tahun 2022, jumlah penyimpangan internal pada BPR Akasia Mas yang dilakukan Pegawai Tetap sebanyak 1(satu) kejadian dan telah diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	1
Total	2	1
Penjelasan Lebih Lanjut		
Dalam tahun 2022 ada dua nasabah dari kantor Cabang Bekasi yang mengugat BPR Akasia Mas terkait kredit yang diberikan secara ketentuan dan prosedur internal sudah sesuai kebijakan perkreditan BPR, debitur tidak mau memenuhi kewajibannya sudah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi debitur tetap menempuh jalur hukum		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Pada tahun 2022 tidak terdapat Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	24 Desember 2022	Sosial	Pemberian santunan dan bingkisan dalam perayaan natal anak-anak panti asuhan	Panti Asuhan Kasih Sesama Umat	Rp5.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian santunan dan bingkisan dalam perayaan natal anak-anak panti asuhan pada tahun 2022 sebagai salah satu bentuk CSR					

Tangerang, 30 Januari 2023

BPR Akasia Mas

Disiapkan Oleh

Disetujui Oleh

Agus SE,MM
Direktur Utama

Johnny Laurenz Tamarindang
Komisaris Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
BPR Akasia Mas Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola BPR Akasia Mas selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tangerang, 30 Januari 2023

BPR Akasia Mas

Disiapkan Oleh


Agus SE.MM
Direktur Utama

Disetujui Oleh


Johnny Laurenz Tamarindang
Komisaris Utama

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: BPR Akasia Mas
Alamat	: Ruko Mall WTC Serpong No.5829 & 5831 Jl. Raya Serpong, Pd. Jagung, Serpong Utara 15326
Nomor Telepon	: 021-53163360
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp38.199.319.000,00
Total Aset	: Rp331.644.396.000,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR Akasia Mas Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	0.2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.06	0.159
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.1	0.11
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.03	0.103
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.23	0.123
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.51	0.151
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.7	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
Nilai Komposit			1.1
Peringkat Komposit			1



Predikat Komposit

Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1)

Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.06)

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Pelaksanaan tugas dan kelengkapan komite-komite dalam proses penyusunan oleh Manajemen yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga dpt berjalan secara efektif. Komite kredit telah terbentuk dan berjalan sesuai fungsinya.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.1)

Tidak terjadi Benturan kepentingan dalam hal adanya Kebijakan Direksi dan telah disusun aturan/ kebijakan mengenai benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.03)

Penerapan fungsi kepatuhan bank belum dapat sepenuhnya terlaksana karena terbatasnya jumlah personil yang kompeten, sehingga fungsi kepatuhan langsung ditangani oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.23)

Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (risk based audit) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang

ditetapkan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.51)

Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profit risiko belum didukung dengan SIM yang memadai.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaporan rutin mengenai BPMK telah dilaksanakan dengan tertib.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Rencana Bisnis bank telah disiapkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis mencapai lebih dari 90% Rencana Bisnis bank.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan dan telah dicantumkan dalam website BPR Akasia Mas.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Governance Structure BPR Akasia Mas

a. Faktor Positif

BPR senantiasa berpedoman pada visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi BPR. Jumlah komposisi Direksi, Komisaris, dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku

2. Governance Process

a. Faktor negatif

Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi

Rencana strategis Bank, yaitu : pelaksanaan rencana bisnis bank harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh, dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik serta mewujudkan kesinambungan visi dan misi perusahaan



Tangerang, 30 Januari 2023

BPR Akasia Mas

Disiapkan Oleh



Agus SE,MM
Direktur Utama

Disetujui Oleh



Johnny Laurenz Tamarindang
Komisaris Utama